Marsipature Hutanabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
https://jurnal.devitara.or.id/index.php/abdimas
Volume 1, No 02 tahun 2024
E-ISSN 3032-3282

Pelatihan Pengelolaan Website DPRD Kabupaten Nias Selatan untuk Mendukung Publikasi Informasi Publik

[1]Alwin Fau, [2]Kurnia Ulfa
[1,2]Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer & Teknologi Informasi, Universitas Budi Darma, Indonesia

Email: [1]alwinfau@gmail.com, [2]kurniaulfa82@gmail.com

ABSTRACT

This community service article described a website management training program for approximately 15 employees and staff members of the Regional People's Representative Council (DPRD) of South Nias Regency. The activity responded to difficulties in operating the institution's website and publishing information for the public. It aimed to strengthen participants' practical understanding of the website as a channel for institutional communication and public information. The program was implemented at the DPRD office on 23 August 2022, beginning at 09:00 Western Indonesian Time. Preparation included institutional approval, coordination with the partner, scheduling, and preparation of training materials. The training was delivered through an explanation of website functions followed by guided practice in preparing and publishing content. The original activity report recorded approximately 15 participants and noted that participants successfully created and posted one news item on the existing website. The report also described positive participant responses, but did not provide pre- and post-training scores or a standardized assessment of competency improvement. Accordingly, the outcomes were interpreted descriptively. The activity demonstrated a practical first step toward improving the capacity of institutional staff to manage public information, while highlighting the need for regular content governance and more systematic follow-up evaluation.

Keywords: *community service; website management; DPRD South Nias; public information; staff training*

Copyright © 2024 **Marsipature Hutanabe**.
All rights reserved is Licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)

PENDAHULUAN

Pemanfaatan situs web dalam pelayanan pemerintahan berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat atas informasi yang akurat, mudah dijangkau, dan diperbarui. Dalam konteks lembaga perwakilan rakyat daerah, website dapat berfungsi sebagai sarana publikasi aktivitas kelembagaan, agenda, berita, dan informasi yang perlu diketahui masyarakat. Perkembangan internet memungkinkan informasi disampaikan lebih cepat, tetapi kebermanfaatannya tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi. Kesiapan pengelola konten dan kejelasan tanggung jawab publikasi menjadi faktor yang menentukan apakah website benar-benar digunakan secara berkelanjutan.

DPRD Kabupaten Nias Selatan merupakan mitra kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaporkan dalam dokumen sumber. Berdasarkan identifikasi masalah oleh tim pelaksana, pegawai dan staf masih menghadapi kendala dalam menggunakan website instansi, terutama ketika menyiapkan, memasukkan, dan memublikasikan informasi atau berita. Keterbatasan kemampuan operasional tersebut berpotensi menyebabkan informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat tidak dipublikasikan secara optimal. Permasalahan mitra bukan pengembangan sistem baru, melainkan pemanfaatan website yang telah tersedia secara lebih baik oleh personel yang bertugas.

Kebutuhan peningkatan keterampilan pengelolaan website selaras dengan prinsip keterbukaan informasi publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menempatkan akses informasi sebagai unsur penting penyelenggaraan badan publik (Republik Indonesia, 2008). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 juga menegaskan arah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk mewujudkan tata kelola yang efektif, transparan, dan akuntabel (Republik Indonesia, 2018). Kedua regulasi tersebut digunakan sebagai kerangka normatif; pelatihan dalam laporan ini tidak dimaksudkan sebagai audit kepatuhan hukum instansi.

Kajian tata kelola digital menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi bukan semata persoalan tersedianya perangkat. OECD (2020) menekankan pendekatan layanan publik yang dirancang dari kebutuhan pengguna, terbuka, dan berbasis proses kelembagaan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (2022) juga menempatkan layanan daring pemerintah dalam pembahasan perkembangan layanan publik digital. Dengan demikian, kemampuan staf memublikasikan materi pada website lembaga merupakan salah satu keterampilan operasional yang mendukung penyediaan informasi, meskipun tidak dengan sendirinya menjamin mutu seluruh layanan digital pemerintah.

Dari sisi pengalaman pengguna, standar ISO 9241-11:2018 menempatkan efektivitas, efisiensi, dan kepuasan dalam konteks penggunaan sebagai unsur penting penilaian kegunaan sistem (International Organization for Standardization [ISO], 2018). Pedoman aksesibilitas web juga membantu menjelaskan mengapa informasi semestinya dibuat mudah ditemukan serta dipahami oleh beragam pengguna (World Wide Web Consortium [W3C], 2018). Prinsip tersebut relevan sebagai pertimbangan pengelolaan konten, bukan sebagai klaim bahwa evaluasi kegunaan atau aksesibilitas website DPRD telah dilakukan dalam kegiatan ini.

Pelatihan dipilih karena permasalahan yang ditemukan berhubungan dengan keterampilan pelaksanaan tugas. Pembelajaran praktis dapat menghubungkan penjelasan tentang fungsi website dengan pengalaman langsung mengoperasikan sarana yang tersedia. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan pembelajaran berbasis pengalaman yang menempatkan praktik dan refleksi sebagai unsur pembentukan pengetahuan (Kolb, 1984). Dalam pelaksanaannya, materi diarahkan pada pengenalan fungsi website sebagai media informasi dan komunikasi, diikuti pendampingan pemanfaatan platform untuk publikasi berita.

Tujuan kegiatan adalah memberikan pengetahuan kepada pegawai dan staf DPRD Kabupaten Nias Selatan mengenai pemanfaatan website sebagai media komunikasi publik dan meningkatkan kemampuan dasar mereka mengoperasikan sarana komputer yang mendukung pengelolaan konten. Manfaat yang diharapkan ialah distribusi informasi kelembagaan yang lebih lancar dan pengelolaan publikasi yang lebih tertib. Keunggulan praktis kegiatan ini terletak pada orientasinya terhadap masalah nyata mitra, yaitu kebutuhan melakukan pengisian berita pada portal yang telah tersedia, bukan pada pembuatan aplikasi baru.

Artikel ini menyajikan proses dan hasil pengabdian berdasarkan laporan kegiatan yang tersedia. Pembahasan membedakan secara eksplisit antara hasil yang benar-benar tercatat, berupa pelaksanaan pelatihan dan contoh publikasi satu berita, dengan manfaat jangka panjang yang masih berupa harapan. Pembedaan tersebut penting agar simpulan mengenai kemampuan peserta tidak melampaui bukti yang disajikan. Naskah juga memberikan arah evaluasi yang dapat digunakan ketika kegiatan sejenis dilaksanakan kembali.

METODE

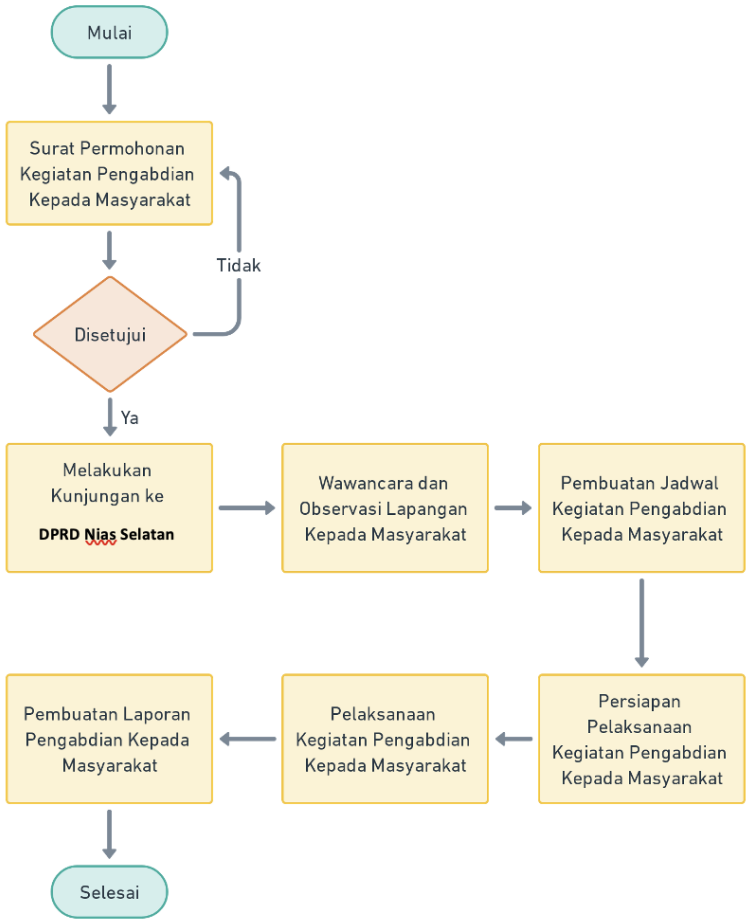
Kegiatan menggunakan pendekatan pelatihan tatap muka dengan pemaparan materi dan praktik penggunaan website. Sasaran kegiatan adalah pegawai dan staf Kantor DPRD Kabupaten Nias Selatan yang bertanggung jawab atau berkepentingan terhadap pengelolaan informasi kelembagaan. Laporan menyebutkan sekitar 15 peserta; tidak dicantumkan daftar karakteristik rinci, pembagian peran, ataupun data kemampuan awal secara individual. Karena itu, jumlah tersebut dilaporkan sebagai perkiraan sesuai dokumentasi sumber.

Program diselenggarakan selama satu hari pada 23 Agustus 2022 mulai pukul 09.00 WIB di Kantor DPRD Kabupaten Nias Selatan. Tim terlebih dahulu berkoordinasi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Budi Darma untuk memperoleh persetujuan kegiatan. Koordinasi berikutnya dilakukan dengan pihak DPRD melalui surat permohonan, penentuan jadwal, kesepakatan jumlah peserta, dan penyusunan bahan presentasi yang sesuai dengan permasalahan mitra.

Tahapan pelaksanaan merujuk pada bagan alir dalam laporan: permohonan kegiatan dan persetujuan, kunjungan lokasi, wawancara atau observasi lapangan, penyusunan jadwal, persiapan materi, pelaksanaan pelatihan, dan penulisan laporan. Urutan tersebut memperlihatkan proses koordinasi administratif hingga penyampaian materi. Prosedur ini dipilih karena kegiatan pengabdian menekankan transfer pengetahuan operasional, bukan eksperimen terkontrol.

Selama sesi pelaksanaan, tim menjelaskan peran website sebagai media komunikasi dan informasi kelembagaan. Peserta kemudian diberi kesempatan mempelajari pengoperasian platform yang telah tersedia dan mempraktikkan proses penyusunan serta pemuatan informasi berita dengan pendampingan. Bahan yang disampaikan bersifat pengenalan dan penggunaan website, tanpa klaim bahwa peserta mendapatkan pelatihan pemrograman, pengembangan sistem, ataupun pengujian keamanan aplikasi.

Evaluasi yang tersedia dalam laporan bersifat observasional. Indikator yang dapat ditelusuri ialah keterlibatan peserta saat pelatihan dan tersusunnya satu berita yang dipublikasikan melalui portal website. Laporan tidak menyertakan instrumen evaluasi terstandar, hasil pretest atau posttest, penghitungan persentase keberhasilan setiap peserta, ataupun analitik kunjungan website. Dengan demikian, penilaian keberhasilan dalam artikel ini dibatasi pada keluaran kegiatan yang terdokumentasi dan deskripsi respons peserta. Untuk kegiatan lanjutan, instrumen yang dirancang berbasis efektivitas dan kemudahan penggunaan dapat menjadi pelengkap (ISO, 2018).



Gambar 1. Bagan alir pelaksanaan kegiatan pengabdian sesuai laporan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Kantor DPRD Kabupaten Nias Selatan sesuai waktu yang tercatat, yaitu 23 Agustus 2022. Peserta yang disebutkan dalam laporan berjumlah kurang lebih 15 orang dari unsur pegawai dan staf. Pelaksanaan diarahkan pada persoalan operasional website yang menjadi sarana penyampaian informasi kepada masyarakat. Penyampaian materi disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan dan pengelolaan konten, sehingga contoh yang diberikan berkaitan dengan publikasi informasi pada portal yang sudah ada.

Bukti keluaran yang paling spesifik dalam laporan adalah kemampuan peserta membuat dan memublikasikan satu berita pada portal website setelah mengikuti pelatihan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa contoh tugas publikasi dapat diselesaikan dalam konteks kegiatan dengan pendampingan yang diberikan. Namun, laporan tidak menguraikan apakah setiap peserta secara individual melakukan publikasi atau apakah satu berita tersebut dikerjakan secara bersama. Oleh sebab itu, hasil ini tidak ditafsirkan sebagai bukti bahwa seluruh peserta telah mandiri mengoperasikan seluruh fungsi platform.

Pengamatan penyelenggara juga menggambarkan peserta mengikuti pelatihan secara antusias dan merespons materi dengan positif. Pernyataan tersebut merupakan catatan kualitatif tim, bukan skor kepuasan yang diperoleh dari kuesioner. Dokumentasi kegiatan dalam laporan berfokus pada proses pelatihan dan alur persiapan; data jumlah unggahan

setelah kegiatan, kualitas berita yang dipublikasikan, serta tingkat keterbaruan website tidak tersedia. Temuan yang dilaporkan karena itu bersifat hasil awal dari kegiatan satu hari.

Tabel 1. Ringkasan pelaksanaan dan bukti hasil kegiatan

Komponen	Keterangan berdasarkan laporan
Mitra	DPRD Kabupaten Nias Selatan
Waktu dan lokasi	23 Agustus 2022, mulai 09.00 WIB; Kantor DPRD Kabupaten Nias Selatan
Peserta	Sekitar 15 pegawai dan staf
Bentuk kegiatan	Pemaparan dan praktik penggunaan website
Keluaran teramati	Satu berita dibuat dan dipublikasikan pada website
Respons peserta	Digambarkan antusias dan positif secara deskriptif
Data evaluasi tidak tersedia	Nilai awal/akhir, persentase peningkatan, dan pemantauan publikasi lanjutan

Pembahasan Kebutuhan Pengelolaan Website

Pengoperasian website badan publik perlu dipahami sebagai rangkaian pekerjaan yang melibatkan penyiapan bahan, pemeriksaan isi, penyuntingan, publikasi, dan pembaruan informasi. Pelatihan dalam laporan menitikberatkan kemampuan awal menggunakan platform, khususnya pengunggahan berita. Capaian satu berita menunjukkan bahwa keterampilan dasar tersebut dapat diperkenalkan melalui pendekatan langsung. Meskipun begitu, rutinitas pengelolaan konten memerlukan pembagian tugas dan prosedur yang tidak didokumentasikan secara rinci dalam laporan.

Dalam perspektif tata kelola digital, informasi yang disediakan oleh instansi perlu bersifat bermanfaat dan sesuai kebutuhan publik. OECD (2020) menekankan dimensi layanan digital yang berorientasi pengguna dan keterbukaan, sedangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 memberikan landasan hak memperoleh informasi publik (Republik Indonesia, 2008). Pelatihan ini dapat dibaca sebagai intervensi skala terbatas di tingkat kompetensi staf. Kegiatan bukan bukti bahwa seluruh proses keterbukaan informasi di DPRD telah optimal atau bahwa website sudah memenuhi semua persyaratan layanan publik.

Kualitas pengelolaan website juga berkaitan dengan kejelasan isi, kemudahan menemukan informasi, dan keterbacaan. Prinsip aksesibilitas konten web membantu menjelaskan pentingnya struktur informasi dan penyajian yang dapat digunakan beragam kelompok masyarakat (W3C, 2018). Akan tetapi, evaluasi aksesibilitas teknis, pemeriksaan keamanan, atau audit mutu konten tidak termasuk kegiatan yang dilaporkan. Penjelasan prinsip-prinsip tersebut dalam artikel digunakan untuk memberikan konteks mengapa keterampilan pengelolaan konten perlu dikembangkan secara berkelanjutan.

Penelitian penerimaan teknologi menempatkan kemanfaatan dan kemudahan penggunaan sebagai faktor penting saat seseorang menggunakan sistem informasi (Davis, 1989; Venkatesh et al., 2003). Model keberhasilan sistem informasi juga mengingatkan bahwa kualitas sistem dan informasi perlu dibedakan dari kepuasan atau dampak penggunaannya (DeLone & McLean, 2003). Rekomendasi tata kelola pemerintah digital menekankan koordinasi dan pemanfaatan teknologi yang berorientasi kebutuhan publik (OECD, 2014). Rujukan tersebut menjadi kerangka pembacaan hasil, bukan indikator yang telah diukur dalam pelatihan. Praktik langsung membantu peserta menjembatani konsep penggunaan website dengan tugas yang nyata. Dalam kerangka pembelajaran berbasis pengalaman, kesempatan mencoba dan menerima umpan balik memungkinkan peserta memahami urutan kerja lebih konkret (Kolb, 1984). Laporan memang menunjukkan penyelesaian tugas publikasi

satu berita, tetapi tidak memberikan catatan terperinci mengenai umpan balik individual maupun pengulangan praktik. Dengan demikian, keberhasilan yang paling kuat untuk disimpulkan adalah terlaksananya pembelajaran operasional dan terhasilkannya satu keluaran publikasi pada saat pelatihan.

Evaluasi dan Tindak Lanjut

Pada kegiatan satu hari, penilaian berbasis keluaran sederhana dapat digunakan sebagai indikasi awal, namun belum cukup untuk membuktikan peningkatan keterampilan secara kuantitatif. Ketiadaan pengukuran awal dan akhir berarti perbedaan kemampuan peserta sebelum dan sesudah pelatihan tidak dapat dihitung. Selain itu, laporan belum memuat ukuran ketepatan isi berita, waktu yang diperlukan untuk memublikasikan informasi, maupun kemampuan melakukan tugas tanpa pendampingan. Batasan ini perlu disebutkan agar interpretasi hasil tetap proporsional.

Untuk pengembangan kegiatan berikutnya, evaluasi dapat dirancang menggunakan tugas praktik yang seragam, misalnya menyiapkan judul dan isi berita, memilih kategori, mengunggah ilustrasi yang sah, memeriksa tampilan, lalu memublikasikan atau menyimpan draf sesuai hak akses. Hasil dapat dinilai dengan rubrik penyelesaian tugas, ketepatan konten, dan waktu pengerjaan; pendekatan pengukuran kegunaan memperhatikan efektivitas serta efisiensi penyelesaian tujuan (ISO, 2018). Rekomendasi ini merupakan usulan pengembangan, bukan prosedur yang diklaim telah diterapkan pada kegiatan 2022.

Mitra juga disarankan membentuk jadwal pembaruan konten serta menetapkan petugas penanggung jawab sehingga keterampilan awal tidak berhenti pada pelatihan. Penerapan prosedur pemeriksaan isi sebelum publikasi dapat membantu mencegah penyebaran informasi yang kurang akurat. Agar manfaat bagi masyarakat dapat ditelusuri, pengelola dapat menyimpan catatan unggahan, jenis informasi yang dipublikasikan, dan kendala teknis yang muncul. Pencatatan sederhana tersebut akan memberikan dasar evaluasi yang lebih kuat apabila program pendampingan diulangi.

Tabel 2. Pemisahan temuan terdokumentasi dan rekomendasi lanjutan

Aspek	Status dan penjelasan
Publikasi berita	Terdokumentasi: satu berita berhasil dipublikasikan pada kegiatan
Respons peserta	Deskriptif: dinyatakan antusias, tanpa skor kuesioner
Kemandirian tiap peserta	Belum dapat ditetapkan dari laporan
Pengukuran pretest–posttest	Tidak tersedia dalam laporan
Rubrik praktik dan pemantauan unggahan	Rekomendasi untuk pelaksanaan selanjutnya

KESIMPULAN

Pelatihan penggunaan website bagi pegawai dan staf DPRD Kabupaten Nias Selatan telah dilaksanakan sebagai respons terhadap kendala pemanfaatan platform informasi kelembagaan. Melalui koordinasi dengan mitra, persiapan materi, penyampaian konsep, dan praktik pengisian konten, kegiatan memberikan pengalaman langsung dalam pengoperasian website yang telah tersedia. Berdasarkan laporan kegiatan, peserta mengikuti pelatihan dengan respons positif dan berhasil menghasilkan satu berita yang dipublikasikan pada portal. Temuan tersebut menjadi bukti awal bahwa pendampingan operasional dapat membantu pelaksanaan tugas publikasi informasi di lingkungan DPRD. Meskipun demikian,

laporan tidak mencakup penilaian kemampuan individual sebelum dan sesudah kegiatan, sehingga peningkatan kompetensi tidak dapat dinyatakan dalam persentase ataupun dibandingkan secara statistik. Pelaksanaan satu hari juga belum membuktikan keberlanjutan pengelolaan konten setelah pelatihan. Ke depan, pendampingan sebaiknya dilengkapi penanggung jawab publikasi, pedoman pengelolaan berita, evaluasi berbasis tugas, dan pemantauan pembaruan informasi secara berkala. Dengan langkah tersebut, keterampilan yang diperkenalkan dalam kegiatan dapat dikembangkan menjadi praktik pengelolaan website yang lebih tertib, konsisten, dan berguna bagi pelayanan informasi publik.

REFERENSI

International Organization for Standardization. (2018). ISO 9241-11:2018: Ergonomics of human-system interaction—Part 11: Usability: Definitions and concepts. https://www.iso.org/standard/63500.html

Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. Prentice Hall.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2014). Recommendation of the Council on Digital Government Strategies (OECD/LEGAL/0406). https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/306

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). The OECD digital government policy framework: Six dimensions of a digital government (OECD Public Governance Policy Papers No. 02). OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/f64fed2a-en

Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2022). E-government survey 2022: The future of digital government. United Nations Department of Economic and Social Affairs. https://desapublications.un.org/publications/un-e-government-survey-2022

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/141

Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. https://peraturan.bpk.go.id/Details/96913/perpres-no-95-tahun-2018

World Wide Web Consortium. (2018). Web content accessibility guidelines (WCAG) 2.1. https://www.w3.org/TR/WCAG21/

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3), 319–340. https://doi.org/10.2307/249008

DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. Journal of Management Information Systems, 19(4), 9–30. https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748

Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. MIS Quarterly, 27(3), 425–478. https://doi.org/10.2307/30036540